

RUMUSAN HASIL DISKUSI KOMISI II
BIDANG
URUSAN LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

Pada hari ini Rabu tanggal 13 Oktober 2010 pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Balikpapan tahun 2010, dengan tema “ **DENGAN SEMANGAT PERUBAHAN MEMPERKOKOH LANDASAN MENUJU PERADILAN YANG AGUNG**”

- Memperhatikan :**
1. Pengarahan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 2. Pengarahan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.
 3. Pengarahan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.
 4. Pengarahan Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 5. Pengarahan Ketua Muda Bidang Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Membaca :**
- Paparan yang disajikan :
1. Beberapa Permasalahan dilingkungan Uldilag oleh Tuada Uldilag.
 2. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama oleh Prof DR.H.Abdul Manan SH, S.Ip.,M.Hum.
 3. Pembaruan Hukum Oleh Drs. H. Mukhtar Zamzami, SH, MH.
 4. Hukum Kewarisan KHI Oleh Drs. H. Habiburrahran, SH., M.Hum.

5. Pembinaan Peradilan Agama Dan Upaya Peningkatan Akses Terhadap Keadilan Untuk Semu (Justice For All) Oleh Drs. H. Wahyu Widiyana, MA.
6. Kode Etik Mediator Oleh Drs. H. Hamdan, SH, MH.

Menimbang : Bahwa setelah mendengar paparan serta pendapat yang berkembang didalam diskusi kelompok untuk lingkungan Peradilan Agama perlu ditetapkan hasil diskusi tersebut dan menyimpulkan sebagai berikut:

M E N Y I M P U L K A N

A. Permasalahan Teknis Yustisial.

1. Semua hasil rumusan pada Rakernas tahun 2009 di Palembang kecuali yang diadakan perubahan dalam rumusan ini, tetap berlaku dan dijadikan sebagai rumusan dalam Rakernas tahun 2010 di Balikpapan.
2. Hakim dalam mengadili perkara, harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari Penggugat dan Tergugat serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.
3. Hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara, dapat menggunakan teknik dan penemuan hukum dengan metode interpretasi, kontruksi dan hermeneutika hukum.
4. Hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara perceraian dan atau hadlonah, disamping mempertimbangkan KHI, UU No. 1 tahun 1974, Peraturan

Pemerintah No. 9 tahun 1975 juga harus memperhatikan tentang UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT serta UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

5. Ahli Waris Pengganti sebagaimana tersebut dalam Pasal 185 KHI pelaksanaannya dibatasi kepada keturunan garis lurus kebawah sampai dengan derajat cucu, garis lurus keatas sampai dengan derajat Kakek / Nenek dan garis kesamping sampai dengan derajat Keponakan.
6. Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang menyangkut Perseroan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, namun Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili, memutus serta menyelesaikan sengketa harta bersama, maupun sengketa waris yang objek sengketanya berupa saham di Perseroan Terbatas.
7. Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan penetapan itsbat nikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) KHI agar penetapan itsbat nikah tersebut dibuat dalam satu kesatuan dengan cerai gugat / ikrar talak dan dalam pertimbangan hukumnya dipertegas dengan pernyataan bahwa itsbat nikah tersebut hanya untuk proses perceraian.
8. Masalah perceraian yang para pihaknya / salah satu pihak adalah anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), hendaknya memperhatikan Peraturan Panglima TNI No. Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 Tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Perajurit.
9. Pelaksanaan SEMA No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara.
10. Pengisian Buku Jurnal di Pengadilan Tingkat Pertama atas perkara yang diajukan secara Prodeo, untuk tahap awal; Panjar biaya Perkara maupun untuk Biaya Pemanggilan Para Pihak harus ditulis NIHIL, selanjutnya jika permohonan untuk

berperkara secara Prodeo dikabulkan maka dalam buku jurnal ditulis jumlah Panjar Biaya Perkara, untuk perkara secara prodeo ditingkat Banding dan atau Kasasi mengacu pada Lampiran B SEMA No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

11. Dalam proses pemeriksaan Itsbat Nikah harus dilaksanakan secara seksama dan teliti, tidak ada istilah Tajdidun Nikah.

12. Untuk membantu Tenaga Kerja Wanita / Tenaga Kerja Indonesia yang menghadapi masalah hukum diluar negeri khususnya yang menyangkut masalah bidang perkawinan, perlu trobosan untuk melaksanakan pemeriksaan / persidangan perkara itsbat nikah di Kedutaan Besar Indonesia atas biaya dari Kedutaan / Kementerian Luar Negeri.

13. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Hakim tingkat banding berwenang untuk memeriksa, mengadili kembali dan memutus perkara sebagai yudex factie. Dalam hal Hakim tingkat banding berpendapat putusan Hakim Tingkat Pertama lalai menerapkan ketentuan hukum formil, maka amar putusan ditingkat Banding disamping menyatakan Putusan Pengadilan Agama Batal Demi Hukum, Pengadilan tingkat Banding harus mengadili sendiri atau memerintahkan kepada Pengadilan tingkat Pertama untuk memeriksa ulang dan memutuskan perkaranya.

14. Untuk kepastian hukum, Putusan izin ikrar talak yang tidak dilaksanakan setelah lewat tenggang waktu 6 bulan dari tanggal Penetapan Hari Sidang untuk ikrar talak, perlu adanya penetapan yang menyatakan bahwa Putusan tentang izin ikrar talak tersebut sudah tidak berkekuatan hukum lagi.

B. Pembinaan administrasi Perkara:

1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No 50 Tahun 2009, secara ex officio hakim harus memasukkan dalam amar putusan tentang kewajiban Panitera untuk menyampaikan salinan putusan / penetapan Ikrar talak kepada Pejabat yang terkait.
2. Dalam rangka menyamakan pola tindak dan pola pikir dalam pelaksanaan Administrasi Perkara, perlu mengoptimalkan pelaksanaan SK KMA/001/SK/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara di Tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan PK.
3. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pola Bindalmin perlu didukung dengan aplikasi SIADPA (Sistem Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama) dan Aplikasi SIADPTA.
4. Disamping sosialisasi perlu bimbingan dan monitoring yang simultan ke Satker tentang pelaksanaan Pola Bindalmin, SIADPA / SIADPTA termasuk sarana administrasi perkara lainnya.
5. Untuk membantu pencari keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis terutama perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas akan diberi bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan atau permohonan sejak tahun 2011. Dalam tahun 2010 agar dilakukan sosialisasi dan pendalaman SEMA No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dalam berbagai kesempatan sehingga pelaksanaan perkara prodeo, sidang keliling dan penyelenggaraan Posbakum dapat berjalan dengan lancar.

6. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tertib pelaksanaan tugas di Pengadilan Agama perlu adanya bimbingan teknis dan monitoring yang dilakukan secara simultan dengan melibatkan hakim dan panitera.
7. Untuk mengoptimalkan pungutan PNBP, agar berpedoman pada PP No. 53 tahun 2008 tentang PNBP.
8. Pemungutan biaya proses agar mengacu pada hasil Rakernas MA-RI tahun 2009 di Palembang.
9. Pengembalian sisa panjar biaya perkara diberikan segera setelah sidang selesai, dengan menggunakan instrumen pengembalian sisa panjar. Untuk memngaktifkan upaya tersebut perlu disiapkan loket khususnya yang bertuliskan tempat pengembalian sisa panjar.
10. Laporan perkara prodeo, sidang keliling dan bantuan hukum serta biaya perkara secara berkala dilaporkan melalui SMS Gateway.

C. Peningkatan Kemampuan Tenaga Teknis :

1. Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya tenaga teknis peradilan agama, perlu memperbanyak kesempatan mengikuti diklat, orientasi, workshop dan mengikuti pendidikan formal. Oleh karena itu perlu diadakan kerja sama dengan perguruan tinggi dan instansi terkait lain baik didalam maupun diluar negeri
2. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan hakim dalam hal pengarusutamaan dan sensitifitas gender, perlindungan anak dan penyandang disabilitas perlu adanya kerjasama dengan lembaga terkait.
3. Mengingat pentingnya data kepegawaian yang akurat dalam pelaksanaan mutasi dan pengembangan karier pegawai, diperlukan pengelolaan SIKEP dan SIMPEG secara profesional. imkan kontrol situs PA/MSy di wilayahnya.

E. Lain - lain:

1. Dalam rangka merespon permintaan masyarakat Indonesia di Luar Negeri untuk memperoleh pelayanan hukum khususnya dibidang itsbat nikah perlu adanya kajian yang konkrit tentang landasan hukum dan mekanisme pelaksanaan sidang di luar negeri (Kantor Kedubes).
2. Dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan perlu dilakukan sosialisasi dan pendalaman SEMA 10/2010 tersebut.
3. Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan dan sejalan dengan pemekaran wilayah, perlu segera dibentuk Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.
4. Dalam rangka pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas, perlu dorongan agar Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama mengoptimalkan penggunaan website.

Balikpapan; 12 Oktober 2010.

Tim Perumus,

1. Drs. H.M. Zainal Imamah, SH, MH. (Ketua)
2. Drs. H. Zainuddin Fajari, SH, MH. (Sekretaris)
3. Drs. H. Jufri Ghalib, SH, MH. (Anggota)
4. Drs. H. Chatib Rasyid, SH, MH (Anggota)

5. Drs. H. M.Yamin Awie, SH, MH. (Anggota)
6. Drs. Purwo Susilo, SH, MH. (Anggota)
7. Drs. H. Farid Ismail, SH, MH. (Anggota)
8. Drs. Hasan Bisri, SH, MH. (Anggota)
9. Drs. H. Sayed Usman, SH, MH. (Anggota)
10. Drs. H. Amran Suadi, SH., MH, MM. (Anggota)

11. Drs. H. Faisol, SH, MH. (Anggota)

PESERTA / ANGGOTA KOMISI II
KOMISI ULDILAG

A. HAKIM AGUNG

1. Drs. H. Ahmad Kamil, SH, M.Hum
2. Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, MA.
3. Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, Sip, M.Hum.
4. Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.
5. Drs. H. Hamdan, SH, MH.
6. Drs. H. Muchtar Zamzami.

B. ESELON I DAN II

1. Drs. H. Rum Nessa, SH, MH.
2. Drs. H. Wahyu Widiana, MA.
3. Drs Purwosusilo,SH, MH.
4. Drs. Farid Ismail, SH, MH.
5. Drs. H.M.Zuffran Sabrie, MH.
6. Drs. Hidayatullah Ms. MH.
7. Drs. H. Sayed Usman, SH, MH.
8. Drs. H. Amran Suadi, SH, MH, MM.

C KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

1. Drs. H. Idris Mahmudi, SH, MH
2. Drs. H. Soufyan M. Saleh, SH.
3. Drs. H. Moh. Thahir, SH, MH.
4. Drs. Mahyiddin Usman, SH, MA.
5. Drs. H. Muzani Zahri, SH, MH.
6. Drs.H.A.Mukhsin Asrof, SH, MH.
7. Drs. H. Wildan Suyuthi, M. SH, MH.
8. Drs. H. Dja'far A. Muchith, SH, MH.
9. Drs. H. Sudirman Malaya, SH, MH.
- 10.Drs. H.M. Thahir Hasan.
- 11.Drs. H. Khalilurrahman, SH, MH.
- 12.Drs. H.M.Zainal Imamah, SH, MH.
- 13.Drs. H. Chatib Rasyid, SH, MH.
- 14.Drs. H. Ahmad Syarhuddin, SH, MH.
- 15.Drs. Kusno, SH, MH.
- 16.Drs. H. Alimin Patawari, SH, MH.
- 17.Drs. H. Samarcondy Nawawi, SH, MH.
- 18.Drs. H. Hefni HS. Hasan, MN.Hum.
19. Drs. Yasmidi, SH.

20. Drs. M. Hassan Muhammad, SH, MH.
21. Drs. H. Muh. Djufri Palalo, SH, MH.
22. Drs. H. Abd. razak Ahmad, SH, MH.
23. Drs. Sunusi Khalid, SH, MH.
24. Drs. H.A. Karim Razak.
25. Drs. H. Said Husin, SH, MH.
26. Drs. H.M. Natsir R. Pomalingo, MHI.
27. Drs. H. Jufri Ghalib, SH, MH.
28. H. Abdurrahman HAR, SH.

D WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

1. Drs. H. Armia Ibrahim, SH.
2. Drs. H. Syahron Nasution, SH, MH.
3. Drs. H.M. Yamin Awie, SH, MH.
4. Dra. Husnanini, SH, MH.
5. Drs. H. A. Dahlan, SH, MH.
6. Drs. H. Ajis Jaman Gani, MHI.
7. Drs. H. Sudirman Arief.
8. Drs. H. Muwahhidin, SH, MH.
9. Drs. H. Zainuddin Fajari, SH, MH.
10. Drs. Hassan Bisri, SH, MH.
11. Drs. H. Bahrussan Yunus, SH, MH.
12. Drs. H. Mudjtahiddin, SH, M.H.
13. Drs. Syamsul Falah, SH, M.Hum.
14. Drs. Bahruddin Muhammad, SH, MH.
15. Drs. H. Abdul Halim Syahran, SH, MH.
16. Drs. H. Muslimin Simar, SH, MH.
17. Drs. H. Nurdin Juddah, SH.
18. Drs. H. Mansur Nasir, SH,

19. Drs. H. Ismail, SH, MH.
20. Drs. H. Rodlin Afif, SH.
21. Drs. H. Muhammad Alwi, SH.
22. Drs. H. Jufri, SH.
23. Drs. Said Munji, SH, MH
24. Drs. H. Rahmat Satya Wibawa, M.Hum.
25. Drs. Abuhuraerah, SH, MH.
26. Drs. Abu Amar, SH, MH.

E ASISTEN KOORDINATOR.

1. Drs. H. Faisol, SH, MH.
2. Suhartanto, SH, MH.

F. PANSEK PENGADILAN TINGGI AGAMA.

1. Drs. Syafruddin.
2. Ahmad Zaini, SH, MH.
3. Drs. Pahri Hamidi, SH.
4. Drs. Yustan Azidin, SH, MH.
5. Drs. H. Syamsikar.
6. Tukiran, SH.
7. H.A. Jakin Karim, SH, MH.
8. Drs. Darmadi.
9. Drs. Ibrahim, SH, MH.
10. Drs. Agus Zainal Mutaqien.
11. Drs. H. Bahrin Lubis, SH.
12. Rachmadi Suhamka, SH.
13. Drs. Djuhrianto Arifin, SH, MH.
14. Dra Hj. Siti Maryam.
15. Ny. Herlinawati, SH, MH.

16. H. Tri Haryono, SH.
17. Drs. H. Muhammad Yamin, MH.
18. Drs. H. Zainuddin Zein, SH.
19. Drs. Hidayat AR Paputungan, SH.
20. Drs. H. Sugian Noor, SH.
21. Suparjianto, SH.
22. Drs. M. Darman Rasyid, SH.
23. Drs. H.M.Sabang Mar, SH.
24. Muchammad Yusuf, SH.
25. Arisno Metosono.
26. Khaeril Anwar, SH, MH.
27. Ma'sum Umar, SH, MH.
28. Basri, SH, MH.

29. Ekram Payapo, A.Ag.

P A S G M